



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SRI ILHAM LUBIS
2. Jabatan : KEPALA BIRO ADMINISTRASI AKADEMIK, KEMAHASISWAAN, DAN KERJASAMA
3. NHK : 550154

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.434.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 272 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.720.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 156 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , Rp. 714.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 259.500.000

1. MOBIL, NISSAN X-TRAIL Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 112.000.000
2. MOBIL, TOYOTA COROLLA Tahun 2001, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
3. MOTOR, YAMAHA XEON Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000
4. MOTOR, YAMAHA NUVO Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
5. MOTOR, VESPA PRIMAVERA Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 42.000.000
6. MOTOR, VESPA SPARTAN Tahun 1985, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 79.350.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----



E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	83.547.639
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.856.397.639
III. HUTANG	Rp.	50.400.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.805.997.639

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.